



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata cara Pembentukan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6. Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Komite, adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman, arahan, dan rujukan dalam pembentukan, mekanisme kerja, dan pengisian keanggotaan Komite.

Pasal ...

## Pasal 3

Tujuan Pembentukan Komite yaitu:

- a. sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- b. sebagai lembaga nonstruktural yang berfungsi memberikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Wali Kota dan Dinas dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.

## BAB II

## PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

## Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk Komite untuk menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang bersifat nonstruktural.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 5

- (1) Komite mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi antarpihak dalam rangka penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antarkomunitas ekonomi kreatif baik di tingkat Daerah kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional;
  - c. melakukan ...

- c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan pelaku ekonomi kreatif dalam rangka penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam ekonomi kreatif;
  - e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka penataan dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - f. tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dalam rangka mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan ekonomi kreatif.
- (2) Komite memiliki fungsi sebagai mitra strategis yang produktif dan berkelanjutan guna menunjang kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan komitmen:
- a. menegakkan dan menjaga citra, nama baik, reputasi, dan wibawa Komite;
  - b. menghadiri dan aktif dalam rapat-rapat dan berbagai kegiatan Komite; dan
  - c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan etika.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Komite meliputi:
  - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. dua orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. beberapa Anggota Dewan Pakar; dan
  - e. staf sekretariat yang berasal dari Dinas.
- (2) Tata Kerja Komite dilaksanakan untuk memperlancar tugas dan fungsi Komite yang meliputi:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi Komite yang terbagi dalam bidang-bidang;
  - b. menyusun ...

- b. menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan kepada Dinas;
- c. melakukan kajian, telaahan, penelitian, verifikasi, evaluasi, dan rekomendasi sesuai dengan bidangnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

## BAB V

### KEANGGOTAAN DAN MASA BHAKTI

#### Pasal 7

- (1) Jumlah keanggotaan Komite paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- (2) Unsur keanggotaan Komite terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
  - b. unsur akademisi;
  - c. unsur pelaku ekonomi kreatif;
  - d. unsur dunia usaha;
  - e. unsur media;
  - f. unsur komunitas kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. memiliki penguasaan dan pemahaman yang baik dan memadai mengenai ekonomi kreatif;
  - b. memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk menata dan mengembangkan, serta memajukan ekonomi kreatif;
  - c. memiliki pengalaman, karya, dan prestasi dalam bidang ekonomi kreatif; dan
  - d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komite.

(5) Penjaringan ...

- (5) Penjaringan dan penyaringan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara cermat, transparan, objektif, profesional, dan terukur.
- (6) Keanggotaan Komite ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

Masa bhakti anggota Komite adalah 3 (tiga) tahun.

### BAB VI

#### LAPORAN KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

- (1) Komite wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas secara periodik atau sewaktu-waktu dapat meminta laporan dari Komite.
- (3) Komite dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

### BAB VII

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 10

- (1) Pemberhentian keanggotaan Komite dilakukan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa bhakti sebagai anggota sudah berakhir;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - d. diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Komite;
  - e. tidak memenuhi lagi kriteria sebagai anggota Komite; dan
  - f. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika, dan kepatutan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal anggota Komite diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atas usulan Kepala Dinas dapat mengganti dengan anggota yang baru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 April 2022  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002